BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Wilayah Perbatasan

Menurut Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sisi terluar dari wilayah Negara atau kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengaturan secara khusus mengenai batas-batasnya. Pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat.

2.2 Pola Pergerakan

Perjalanan adalah pergerakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, termasuk pergerakan berjalan kaki (Tamin, 2000;113). Salah satu jenis pergerakan adalah pergerakan berbasis rumah, dimana salah satu atau kedua zona (asal dan/atau tujuan) pergerakan adalah rumah. Pergerakan diklasifikasikan menjadi tiga. Klasifikasi pergerakan tersebut antara lain:

1. Berdasarkan tujuan pergerakan

   Terdapat lima kategori untuk pergerakan berdasarkan tujuan yang sering digunakan. Hal ini berdasarkan pada kasus pergerakan berbasis rumah, yaitu:

   a. Pergerakan ke tempat kerja;
   b. Pergerakan dengan tujuan pendidikan;
   c. Pergerakan ke tempat belanja;
   d. Pergerakan untuk kepentingan sosial dan rekreasi;
   e. Dan lain-lain.

2. Berdasarkan waktu

   Waktu terjadinya pergerakan sangat tergantung pada kapan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, waktu perjalanan sangat

tergantung pada maksud perjalanan. Pergerakan biasanya dikelompokkan menjadi pergerakan pada jam sibuk dan pada jam tidak sibuk.

3. Berdasarkan jenis orang

   Pergerakan berdasarkan jenis orang merupakan salah satu jenis pengelompokan yang penting karena pergerakan individu sangat dipengaruhi oleh atribut sosial-ekonomi. Atribut yang dimaksud antara lain:

   a. Tingkat pendapatan; dinyatakan dalam tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, rendah.
   b. Tingkat pemilikan kendaraan; dinyatakan dalam empat tingkatan, yaitu 0, 1, 2, dan 2+ berdasarkan jumlah kendaraan per rumah.
   c. Ukuran dan struktur rumah tangga; menyatakan jumlah dan jenis pekerjaan anggota keluarga.

Aksesibilitas merupakan suatu konsep yang menghubungkan (mengkombinasikan) sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, dimana perubahan tata guna lahan, yang menimbuklan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota, akan mudah dihubungkan oleh penyediaan prasarana atau sarana angkutan (Black dalam Miro, 2005).

Tingkat aksesibilitas dapat dinyatakan secara kualitatif berupa tabel dan grafik. Tingkat aksesibilitas ini dipengaruhi oleh faktor jarak dan kondisi transportasi.

Tabel 2.1 Klasifikasi Berbagai Tingkat Aksesibilitas secara Kualitatif

Aktivitas Guna Lahan (jarak) / Kondisi transportasi	Dekat	Jauh
Sangat Baik	**Aksesibilitas Tinggi**	**Aksesibilitas Rendah**
Sangat Jelek	**Aksesibilitas Sedang**	**Aksesibilitas Rendah**

2.3 Potensi Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Berdasarkan Kebijakan Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara (Bappenas, 2002), potensi-potensi atau peluang pengembangan kawasan perbatasan antara lain:

1. Kekayaan Sumberdaya Alam

   Pada umumnya daerah perbatasan memiliki kandungan sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat daya ketahanan masyarakat, serta merupakan modal dasar dan peluang untuk percepatan pembangunan daerah masing-masing.

2. Kedudukan Sebagai Outlet (Berbatasan Langsung dengan Negara Tetangga)

   Potensi daerah perbatasan lainnya yang dapat dijadikan peluang bagi percepatan pembangunan daerah adalah letaknya yang memungkinkan hubungan langsung dengan negara tetangga yang merupakan pasar potensial yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi produsen internal di daerah masing-masing, tetapi juga secara nasional.

3. Menjadi Penggerak Kegiatan Ekonomi Wilayah

   Dengan potensi sumber daya alam dan letak geografis di atas, maka kegiatan apapun yang dilakukan di daerah perbatasan akan mencerminkan keseluruhan kepentingan bagian wilayah tanah air lainnya, yang selanjutnya akan dapat menciptakan keterkaitan fungsional yang lebih luas antara negara tetangga dengan bagian wilayah tanah air lainnya.

4. Barometer Keberhasilan Pembangunan Nasional

   Barometer keberhasilan pembangunan nasional termasuk aspek pertahanan keamanan wilayah yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

2.4 Komponen Pembentuk Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan antar negara memiliki komponen pembentuk yang berbeda dari wilayah lainnya. Komponen tersebut terdiri dari unsur ruang, peraturan pendukung, kelembagaan, hubungan dengan pihak luar negeri, dan aspek tata ruang serta prasarananya. Komponen pembentuk wilayah perbatasan, berdasarkan Kebijakan Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan (Bappenas, 2003) dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1 Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) berdasarkan Ditjen Bea dan Cukai adalah tempat yang ditunjuk pada perbatasan negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang bawaan pelintas batas. Manfaat PPLB untuk kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan antara lain:

a. memperlancar arus barang dan orang,
b. pengurusan administrasi dalam satu atap, dan
c. menghindari terjadinya penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Kelembagaan PPLB merupakan manajemen sistem satu atap yangmengumpulkan berbagai fungsi dan kewenangan beberapa instansi dalam satu kelembagaan. Kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan adalah Bea danCukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), Karantina (*Quarantine*), dan Keamanan (*Security*). Dalam kaitan hubungan antar negara, PPLB ini hanya menangani masalah administratif pelintas batas baik orang maupun barang. PPLB pada umumnya terdiri atas beberapa bangunan dan areal tertentu dengan fungsinya masing-masing. Penataan kawasan dan bangunan PPLB umumnya terdiri dari:

a. Bangunan utama sebagai kantor pengurusan administrasi
b. Pintu masuk (gate) yang dilengkapi dengan loket untuk pemeriksaan
c. Pemisahan jalur masuk dan keluar
d. Tempat peristirahatan, toilet, dan lain-lain
e. Taman
f. Parkir kendaraan
g. Kawasan steril
h. Karantina
i. Fasilitas kesehatan

2.4.2 Pelabuhan Darat

Pelabuhan darat merupakan terminal barang dan peti kemas, dimana administrasi dan CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine and Security*) untuk keperluan ekspor dan impor antar negara dapat diselesaikan di sini. Kegiatan bongkar-muat dan pergudangan serta terminal baik terminal penumpang maupun terminal penumpukan peti kemas/barang dilayani seperti halnya di bandara atau pelabuhan laut. Usaha-usaha jasa ekspedisi pengangkutan, *freight forwarder* serta jasa-jasa lain akan tumbuh sebagai pendukung usaha kepelabuhanan yang ada seperti pos, perbankan, air bersih, listrik, transportasi, jasa bongkar muat, peti kemas, pergudangan, bengkel, rumah makan, penginapan serta usaha-usaha pendukung lainnya.

Manfaat dari pelabuhan darat di wilayah perbatasan diantaranya adalah sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Oleh karena kawasan ini merupakan kawasan yang terbuka, diperlukan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan dimana pelaksanaanya bekerjasama dengan instansi terkait. Sedangkan dalam transaksi bisnis, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, walaupun untuk transaksi internasional dapat menggunakan valuta asing melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat ijin sesuai undang-undang RI.

Untuk keperluan diatas selain penataan yang tepat, serta lokasinya yang harus strategis, juga perlu disediakan fasilitas dan prasarana fisik yangmendukung seperti:

a. dermaga/apron/terminal;
b. air bersih;
c. listrik;
d. pos dan telekomunikasi;
e. bangunan perkantoran;
f. gudang dan bangunan pabrik;
g. pengolah sampah dan limbah;
h. fasilitas pemadam kebakaran;
i. CIQ dan fasilitas keamanan;
j. fasilitas kesehatan;
k. fasilitas dan peralatan transportasi;
l. fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

2.4.3 Kawasan Wisata Alam/Lingkungan dan Budaya

Potensi wisata yang berkembang di wilayah perbatasan Kalimantan adalah wisata alam (lingkungan). Dengan potensi hutan yang sangat luas, obyek wisata lingkungan yang dapat dikembangkan cukup banyak.

Ecotourism di wilayah perbatasan merupakan suatu model pengembangan wisata yang tidak hanya sekedar mendatangkan wisatawan negara tetangga kelokasi yang dikunjungi serta menggiring mereka untuk membelanjakan uangnya. Tujuan kegiatan *ecotourism* lebih luas lagi yaitu sebagai sarana untuk mengintegrasikan kegiatan wisata dengan usaha-usaha konservasi lingkungan serta pendidikan untuk lebih perhatian terhadap lingkungan, budaya, etnis maupun keragaman hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Selain itu diharapkan wisata lingkungan ini dapat menjadi suatu model pemberdayaan masyarakat disekitar perbatasan. Kegiatan yang harus disiapkan untuk pengembangan wisata lingkungan di perbatasan meliputi:

a. Menyiapkan dan menciptakan citra kawasan-kawasan serta obyek wisata yang ada, termasuk masyarakatnya seperti keterpencilannya, keunikan budayanya, keanekaragaman hayatinya serta aspek lain yang dapat dikemas menarik.
b. Mewujudkan keterkaitan antara wisata lingkungan dengan wisata lainnya serta dengan kegiatan wisata yang ada di Malaysia.
c. Mengadakan event-event wisata dikaitkan dengan kegiatan bisnis, budidaya pertanian, riset ataupun pendidikan.
d. Melakukan promosi yang dilakukan terpadu dalam suatu paket wisata yang saling terkait satu dengan lainnya.
e. Menyiapkan infrastruktur yang diperlukan, terutama transportasi (akses dari lokasi ke kota terdekat), komunikasi dan kesehatan (untuk keperluan gawat darurat).

2.4.4 Kawasan Akuakultur

Akuakultur dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumberdaya alam yang mengutamakan sumberdaya hayati laut agar diperoleh manfaat optimal melalui prinsip pengembangan agribisnis. Konsep ini meliputi pengembangan sumberdaya perikanan sebagai sektor sentral yang ditunjang dengan pemanfaatan sumberdaya hayati dan nirhayati di sekitarnya, berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengembangan kawasan akuakultur di wilayah perbatasan didasarkan pada asumsi:

a. Pola akuakultur merupakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan potensi sumberdaya lahan/laut
b. Rencana kegiatan pengembangan kawasan akuakultur di Kalimantan Barat bergantung pada ketersediaan dan daya dukung lahan/laut.
c. Karakteristik sumberdaya lahan laut dan pantai yang akan dikembangkan sangat khas, sehingga perumusan rencana pengembangannya perlu diperhitungkan secara matang sesuai dengan potensi lahan pantai dan laut yang tersedia.

Dalam rangka pengembangan kawasan akuakultur diperlukan dukungan prasarana listrik dan jalan sehingga berbagai fasilitas penunjang kegiatan seperti *cool storage*, *ice making*, *canning*, pasar ikan, dapat dioperasikan serta keterkaitan pengembangan kawasan akuakultur dengan kawasan-kawasan lainnya diperbatasan dapat dilaksanakan.

2.4.5 Kawasan Berikat

Kawasan Berikat atau *Bonded Zone* pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tempat penimbunan berikat dalam kaitan dengan permasalahan kepabeanan, dimana dalam kawasan tersebut, diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, demi untuk menjaga peningkatan dan kelancaran arus ekspor. Dalam kawasan tersebut pemerintah menjamin bahwa untuk barang-barang impor yang akan digunakan sebagai penunjang produksi barang untuktujuan ekspor akan diberikan fasilitas baik secara finansial yang berupapenangguhan pembayaran bea masuk, dan pungutan pajak dalam rangka impor serta fasilitas administrasi berupa percepatan pengurusan dokumen baik impor maupun ekspor sehingga proses produksi dan ekspor bisa berjalan efisien dan berdaya saing tinggi.

2.4.6 Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk:

a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri;
d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

2.4.7 *Welcome Plaza* (Kawasan Sentra Bisnis)

Kawasan sentra bisnis merupakan suatu kawasan perdagangan/bisnis yang berada disuatu kawasan tertentu dimana fasilitas-fasilitas penunjangnya sudah relatif tersedia. Kawasan ini akan menjadi tempat terjadinya aktifitas perdagangan, transaksi maupun aktifitas-aktifitas ekonomi lainnya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di kawasan bisnis antara lain: pertokoan, supermarket maupun pasar tradisional, perbankan, perhotelan, jalan dan alat transportasi, listrik, air bersih, telpon dan sebagainya.

2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya (SNI 03-6981-2004).

Standar pelayanan sarana dan prasarana lingkungan berbeda untuk setiap lingkungan hunian dan bidangnya, antara lain:

2.5.1 Pendidikan

Standar sarana pendidikan menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Adapun standar tersebut adalah sebagai berikut.

A. Sekolah Dasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

B. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

1. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24rombongan belajar.
2. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebihdari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
3. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

C. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

D. Taman Kanak-Kanak (TK)

Standar sarana untuk TK menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

1. Jumlah minimum dilayani adalah 1000 anak-anak usia 5-6 tahun sebanyak 8%.
2. Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 500 meter, dihitung dari unit terjauh.

2.5.2 Perdagangan

Standar sarana perdagangan menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

A. Warung

Warung adalah fasilitas perdagangan yang berfungsi menjual sembilan bahan pokok pangan. Adapun standar pelayanan warung adalah sebagai berikut.

A. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 250 jiwa.
2. Terletak di pusat lingkungan dan mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 500 meter.

B. Pertokoan

Pertokoan adalah fasilitas perdagangan yang berfungsi menjual barang kebutuhan sehari-hari termasuk sandang dan pangan. Adapun standar pelayanan pertokoan adalah sebagai berikut.

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 2500 jiwa.
2. Terletak di pusat lingkungan dengan radius pencapaian maksimum 1000 meter.

C. Pasar / Pusat Perbelanjaan Lingkungan

Pusat perbelanjaan lingkungan adalah fasilitas perdagangan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, sandang alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, berupa pasar dan toko-toko lengkap dengan bengkel-bengkel reparasi kecil, untuk barang elektronik dan kendaraan bermotor termasuk untuk parkir umum. Adapun standar pelayanan pusat perbelanjaan lingkungan adalah sebagai berikut.

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 2500 jiwa.
2. Terletak di pusat lingkungan.

2.5.3 Kesehatan

Standar sarana kesehatan yang digunakan adalah SNI 03-6981-2004, yaitu sebagai berikut.

A. Posyandu

Posyandu adalah fasilitas kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita. Standar pelayanan posyandu adalah sebagai berikut.

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 1000 jiwa.
2. Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 200 meter.

B. Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan lebih lengkap kepada penduduk dalam bidang kesehatan mencakup dokter spesialis anak dan dokter spesialis gigi. Adapun standar pelayanan puskesmas adalah sebagai berikut.

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 30000 jiwa.
2. Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 1000 meter.

C. Praktek Dokter

Praktek dokter adalah fasilitas kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan pertama kepada penduduk dalam bidang kesehatan umum spesialis. Adapun standar pelayanan praktek dokter adalah sebagai berikut.

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 5000 jiwa.
2. Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 1000 meter.

2.5.4 Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Standar sarana pemerintahan dan pelayanan umum yang digunakan adalah SNI 03-6981-2004, yaitu sebagai berikut.

A. Kantor Desa

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 30000 jiwa.
2. Mudah dicapai.

B. Balai Pertemuan

1. Jumlah minimum penghuni yang dilayani adalah 1000 jiwa.
2. Berada dekat dengan pelayanan umum lainnya.

2.5.5 Jaringan Jalan

Standar jaringan jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:

1. Arteri primer dengan lebar badan jalan minimum 11 meter.
2. Kolektor primer dengan lebar badan jalan minimum 9 meter
3. Lokal primer dengan lebar badan jalan minimum 7,5 meter
4. Arteri sekunder dengan lebar badan jalan minimum 11 meter
5. Kolektor sekunder dengan lebar badan jalan minimum 9 meter
6. Lokal sekunder dengan lebar badan jalan minimum 7,5 meter

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikut yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas (Petunjuk Perencanaan Perkerasan Jalan Tahun 1987). Perkerasan jalan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan di dalam membuat suatu jalan yang bagus dan juga berkualitas baik. Berikut adalah beberapa jenis perkerasan yang biasanya digunakan.

1. Aspal Hotmix

Merupakan jenis aspal yang kualitasnya paling tinggi sehingga tampak halus.Ruas jalan yang menggunakan perkerasan aspal hotmix biasanya ruas jalan yang memiliki hierarki tinggi dan akses yang padat.

2. Aspal

Merupakan jenis aspal yang kualitasnya di bawah aspal hotmix sehingga nampak lebih kasar perkerasannya.

3. Rabat Beton

Merupakan perkerasan dengan blok-blok beton.

4. Paving

Merupakan jenis perkerasan yang sering dipakai oleh developer untuk lingkungan perumahan atau terdapat di ruas jalan permukiman.

5. Plester

Jalan plester terbuat dari campuran semen dan pasir. Jalan ini biasanya terdapat pada jalan lingkungan yang tidak terlalu lebar.

6. Tanah atau berpasir

Merupakan jenis perkerasan yang menggunakan tanah dan pasir.

2.5.6 Jaringan Air Bersih

Standar pelayanan jaringan air bersih menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

1. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan airminum dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. kapasitas mininum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 150 liter/orang/hari.

2.5.7 Jaringan Listrik

Standar pelayananjaringan listrik menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

1. setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain.
2. setiap unit hunian mendapatkan daya listrik minimum 450 VA;
3. harus tersedia jaringan listrik lingkungan dan jaringan listrik untuk hunian;
4. penempatan tiang listrik berada di daerah milik jalan;
5. apabila dibutuhkan, gardu listrik ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatanumum;
6. tersedia penerangan jalan.

2.5.8 Jaringan Telekomunikasi

Standar pelayanan jaringan telekomunikasi menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

1. tersedia jaringan telepon;
2. apabila diperlukan, setiap unit hunian dapat memperoleh sambungan;
3. tersedia telepon umum dengan kapasitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. penempatan telepon umum mudah dilihat, mudah dicapai dan aman.

2.5.9 Jaringan Drainase

Standar pelayanan jaringan drainase menggunakan SNI 03-6981-2004, yaitu:

1. direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah,
2. saluran pembuangan air hujan dapat berupa saluran terbuka atau tertutup,
3. kemiringan saluran minimum 2%,
4. dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan dibuat pada jarak maksimum 50 meter,
5. sistem drainase harus dihubungkan dengan saluran kota, sungai, danau atau laut.

Sarana dan prasarana perbatasan adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas. Sarana prasarana dan pelayanan lintas batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara antara lain:

A. Pos Lintas Batas Tradisional

Setiap Pos Lintas Batas Tradisional dilengkapi dengan sarana dan prasaranapenunjang yang terdiri atas:

1. jalan;
2. listrik;
3. sanitasi;
4. air bersih;
5. saluran drainase;
6. telekomunikasi;
7. perumahan pegawai; dan
8. sarana lain sesuai kebutuhan.

Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Tradisional darat dengan garis batasantar negara ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan dengan perkiraan minimal berjarak 100 m dari garisbatas.

B. Pos Lintas Batas Internasional

Setiap Pos Pemeriksaan Lintas Batas Internasional dilengkapi dengan saranadan prasarana penunjang yang terdiri atas:

1. jalan;
2. listrik;
3. sanitasi;
4. air bersih;
5. saluran drainase;
6. telekomunikasi;
7. balai kesehatan;
8. perumahan pegawai;
9. tempat penukaran uang;
10. pasar/pertokoan;
11. terminal;
12. dan sarana lain sesuai kebutuhan.

2.6 Tingkat Kepuasan Masyarakat (*Importance Performance Analysis*)

Importance Performance Analysis (IPA), dikembangkan sebagai alat untuk penelitian pasar, didasarkan pada konsep bahwa kepuasan adalah hasil preferensi dari suatu objek atau pelayanan dan penilaian kinerjanya (Myers & Alpert dalam Setiawan, 2007). IPA mengkombinasikan atribut-atribut persepsi kepuasan dan kepentingan dalam bentuk skala Likert sebagai bagian dari dimensi kualitas produk, yang terdiri dari sangat penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting.Skala Likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingka kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya (Oliver 1980 dalam Setiawan, 2007). Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Apabila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Apabila kinerja melebihi harapan, maka masyarakat akan sangat puas.

Hasil penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat akan dimasukkan ke dalam diagram kartesius untuk mengetahui prioritasnnya. Diagram kartesius ini meiliki empat kuadaran yang mewakili masing-masing prioritas.

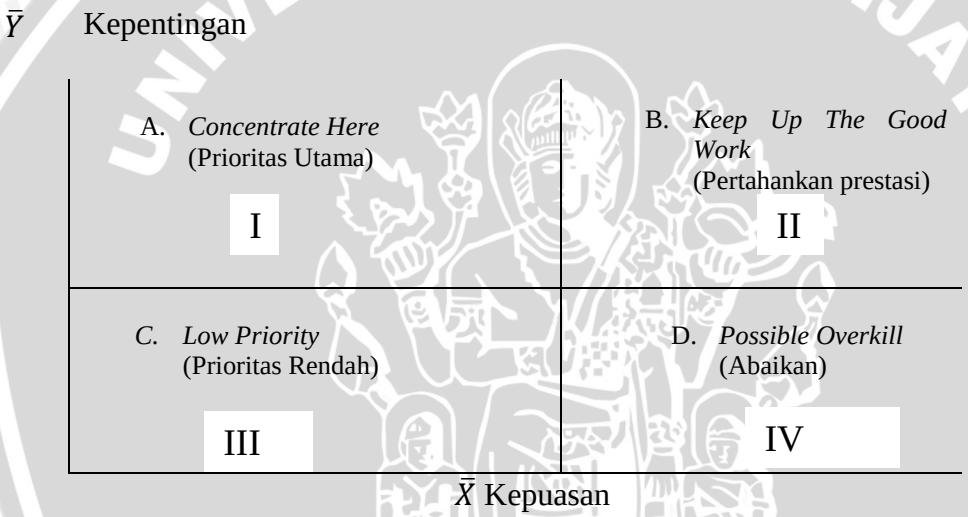

Gambar 2.1 Pembagian Kuadran *Importance-Performance Analysis*

A. *Concentrate Here* (Prioritas Utama)

Atribut-atribut pada kinerja pelayanan suatu tempat dipandang penting oleh masyarakat sebagai dasar keputusan dengan kinerja dan kualitas pelayanan adalah sangat baik.

B. *Keep Up The good Work* (Pertahankan Prestasi)

Atribut-atribut pada kinerja pelayanan suatu tempat cukup penting bagi masyarakat, tetapi mempunyai kualitas pelayanan yang baik sehingga perlu untuk dipertahankan.

C. *Low Priority* (Prioritas Rendah)

Atribut pada kinerja pelayanan suatu tempat mengalami penurunan, karena baik tingkat kepentingan dan kualitas pelayanan dinilai sudah cukup baik.

D. *Possible Overkill* (Abaikan)

Atribut-atribut pada kinerja pelayanan suatu tempat tidak terlalu penting dalam keputusan masyarakat, tetapi memiliki kualitas pelayanan yang baik.

2.7 Tinjauan Kebijakan

2.7.1 RTR Kawasan PPLB dan Komersial Zone di Aruk

Kawasan PPLB dan Komersial Zone di Aruk Kecamatan Sajingan Besar, memiliki beberapa fungsi kawasan, antara lain:

a. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan, fungsinya dalam hierarki perkotaan disiapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan skala pelayanan nasional atau untuk beberapa propinsi dan menjadi 'beranda depan' Negara Indoensia ke negara Malaysia (khususnya Kalimantan dan Sarawak).
b. Pusat Pelayanan Wilayah Belakang. Fungsi sebagai pusat pelayanan daerah belakang berarti penyediaan pelayanan bagi daerah belakangnya. Fungsi tersebut terutama dalam bidang ekonomi. Produsen dari daerah pedesaan (petani, peternak, dan lain-lain) mengangkut hasil produksi ke Aruk, sementara Kawasan Aruk menyediakan sarana dan jasa pemasaran sekaligus memasok sarana produksi dan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan. Di samping itu Kawasan Aruk juga menyediakan banyak macam jasa-jasa sosial (pendidikan, kesehatan, rekreasi dan olahraga, ritual keagamaan, dan lainnya). Dan terakhir, Kota Aruk merupakan pusat kegiatan pemerintah yang mencakup tidak saja wilayah kotanya sendiri, tetapi juga wilayah belakangnya.
c. Pusat Perhubungan Antar Wilayah. Aruk memainkan peranan yang sangat penting sebagai pusat perhubungan antarwilayah. Barang-barang yang dihasilkan di wilayah belakang dikumpulkan untuk dikirimkan ke wilayah lain atau diekspor. Tidak saja barang, perhubungan antarwilayah tersebut juga mencakup manusia. Prasyarat dari pusat perhubungan antarwilayah ini adalah adanya simpul atau gerbang untuk keluar.
d. Pusat Industri Pengolahan. Sebagai pusat industri pengolahan, Kawasan Aruk akan menjadi tempat untuk pabrik, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi (*manufacturing*). Tetapi penampakan fisik itu saja belum cukup. Sebagai pusat industri pengolahan, di Kawasan Aruk ini, sektor industri harus menjadi sektor unggulan (*leading sector*), yang menjadi tulang pungung perekonomian, tidak saja bagi kawasan itu sendiri, tetapi juga wilayah di sekitarnya.

e. (Sub) Pusat Permukiman. Pusat Permukiman dalam hal ini diartikan sebagai konsentrasi penduduk (perkotaan) terbesar, dan diharapkan menjadi penyangga atau motor tingkat urbanisasi. Jadi dengan demikian, pusat permukiman dalam hal ini dapat dipandang dari dua sudut : Intrawilayah dan Antarwilayah. Dalam kerangka intrawilayah, Kawasan Aruk akan menjadi pusat permukiman terbesar, selain Kota Sambas ibukota Kabupaten Sambas.

Rencana Pengembangan Pusat Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Aruk, yang merupakan jangka panjang pengembangan kawasan mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Menciptakan ruang bagi pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berskala nasional dan internasional sehingga dapat menjadi *counter magnet* bagi perkembangan wilayah Sarawak.
b. Mencapai pengembangan ruang yang lebih berimbang, yang berarti bahwa kesenjangan antara kawasan satu dengan kawasan lain pada tingkat minimal, serta hirarki pusat pelayanan berjalan dengan efektif.
c. Mencapai tingkat integrasi wilayah yang lebih baik, di mana hal ini dicirikan dengan semakin membaiknya hubungan antar sub kawasan, sehingga setiap lokasi dapat dijangkau secara mudah.
d. Menyediakan sarana (fasilitas) perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia secara umum, dan khususnya penduduk Kawasan Aruk.
e. Melindungi lingkungan hidup, ini berarti di dalam penataan ruang kawasan, perhatian tidak saja diberikan terhadap bentuk fisik terbangun saja, tetapi juga jalur hijau dan ruang terbuka, sehingga tercapai keseimbangan antara fisik binaan dan alami.
f. Meningkatan penyerapan tenaga kerja, karena dengan pola/model pengembangan kawasan berbasis sektor industri, memungkinkan munculnya sektor ekonomi ikutan, sehingga kesempatan kerja akan muncul tidak hanya pada sektor industri saja, melainkan juga pada sektor ikutannya tersebut.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kawasan Aruk dan mengarahkan pengembangannya sesuai dengan fungsi dan peranan yang diemban, serta sebagai penjabaran dari kebijaksanaan dasar pembangunan kawasan, maka diperlukan suatu strategi pengembangan yang mencakup empat aspek utama yaitu:

A. Strategi Dasar Pengaturan Penduduk

Pola tata ruang sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku (*behaviour*) ekonomi, perilaku sosial dan budaya penduduknya. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kawasan ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu strategi pengembangan dan pengendalian penduduk perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kawasan Aruk di masa yang akan datang.

1. Strategi Pengembangan Penduduk

Dari segi penyebarannya, penduduk Kawasan Aruk cenderung memusat pada sekitar satu pusat saja. Hal ini akan sangat menghambat usaha penataan ruang kota sehingga perlu diadakan pengaturan penyebaran penduduk ini dilakukan dengan membangun berbagai fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan pembangunan sistem prasarana kota yang mengarah pada pola struktur kota yang diinginkan, terutama untuk mencegah pola pemusatan pada satu pusat saja.

2. Strategi Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia

Usaha peningkatan kesempatan kerja harus secara intensif dilakukan terutama pada sektor sekunder dan tersier (non agraris) karena kedua sektor ini merupakan indikator tingkat perkembangan perkotaan. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan, yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja adalah kegiatan industri, perdagangan, dan jasa terutama jasa transportasi.

Pengembangan sumber daya manusia juga diusahakan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada penduduk kawasan, wilayah sekitarnya, bahkan sampai lingkup Propinsi Kalimantan Barat. Strategi pengembangan bidang pendidikan ini adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan pendidikan ditekankan kepada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi pasar tenaga kerja, khusus pendidikan kejuruan yang langsung dapat diterapkan dalam kegiatan produktif terutama untuk menunjang pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat industri pengolahan, pusat pelayanan wilayah belakang, serta pusat perhubungan antarwilayah.
b. Melakukan pembinaan dan pengarahan potensi partisipasi masyarakat melalui pendidikan formal yang dikelola swasta maupun pendidikan keterampilan khusus lainnya.

c. Melibatkan secara langsung maupun tidak langsung sektor-sektor kegiatan produktif (khususnya) untuk ikut serta berperan serta dan bertanggung jawab dalam usaha pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan partisipasif seperti kursus, pelatihan kerja, penyediaan sarana praktek kerja, serta pola kemitraan yang lain.

d. Dalam arti yang lebih luas, pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan penerangan melalui lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta kelompok-kelompok sosial masyarakat, untuk mengembangkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan, kebersihan, pembangunan dan pemeliharaan elemen kota, pembangunan rumah sehat, sanitasi lingkungan, kesehatan dan lain-lain.

B. Strategi Pengembangan Sektor Kegiatan Perkotaan

Strategi pengembangan sektor-sektor kegiatan perkotaan ditujukan terutama untuk menunjang fungsi kota yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sektor-sektor yang dikembangkan adalah sektor jasa, sektor industri, perdagangan, transportasi, serta permukiman dan perumahan. Meskipun pada akhir tahun perencanaan nanti, peranan sektor pertanian akan semakin mengecil, perlu juga dirumuskan strategi pengembangannya, khususnya mengenai keterkaitan dengan sektor hilir.

1. Strategi Pengembangan Sektor Jasa

Strategi pengembangan sektor jasa yang merupakan sektor tersier dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mendukung kegiatan sektor industri dan perdagangan yang berkembang dikawasan ini. Jasa keuangan dan perbankan, serta jasa penyewaan, dan lainnya akan dialokasikan ke pusat kegiatan atau berdekatan dengan sektor sekunder (industri dan perdagangan). Namun demikian perkembangannya sangat tergantung pada perkembangan sektor-sektor lainnya.

2. Strategi Pengembangan Sektor Industri

Pada masa mendatang, sektor industri diskenariokan untuk menjadi sektor unggulan (*leading sector*). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa strategi pengembangan yaitu:

a. Pengembangan kegiatan industri di Kawasan Aruk adalah dengan pemantapan struktur industri. Ini berarti kegiatan industri yang berbasis pertanian terutama industri hasil hutan (kayu) dan ditindaklanjuti dengan

diversifikasi jenis industri kayu. Disamping itu juga dikembangkan industri lain, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan di wilayah hulu, pertanian, perikanan, serta pertambangan.

b. Proses pematangan struktur industri yang ada, berdasarkan perkiraan kebutuhan pasar untuk kawasan Aruk dipersiapkan pengolahan dari bahan mentah ke barang setengah jadi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan industri sedang, menengah, dan kecil. Industri kecil juga berkesempatan untuk melakukan proses pengolahan menjadi barang jadi.

c. Dalam penataan ruang kawasan industri, konsep yang digunakan adalah 'molekuler', dimana industri-industri yang mempunyai basis komoditi yang sama berdekatan sehingga hubungan antar industri lebih erat dan produk industri yang satu dapat menjadi input bagi industri yang lain.

3. Strategi Pengembangan Sektor Perdagangan

Strategi pengembangan kegiatan perdagangan Aruk terutama ditujukan untuk menunjang fungsi Kawasan Aruk sebagai pusat perdagangan kawasan perbatasan dan pusat distribusi barang konsumsi ke wilayah belakangnya. Pada saat ini kegiatan perdagangan di Kawasan Aruk masih merupakan perdagangan campuran antara grosir dan eceran, dengan pola konsentrasi di pusat kota dan Pintu Gerbang Aruk. Untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan ini maka strategi pengembangannya diusahakan dalam rangka penyempurnaan sistem perdagangan yang ada dengan membina dan mengarahkan pemisahan kegiatan perdagangan ini sebagai berikut:

a. Kegiatan perdagangan grosir dan perdagangan eceran yang memiliki orientasi pelayanan ke negara tetangga (Sarawak) dialokasikan di pintu gerbang yang ada sekarang menjadi zone perdagangan bebas (*free trade zone*) untuk memudahkan jangkauan pelayanan dan konsumen dimudahkan dengan fasilitas bebas paspor dan visa.

b. Selain kegiatan yang bersifat pelayanan konsumen (consumer services), juga dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa layanan produsen (*produser services*). Kegiatan ini pada dasarnya adalah untuk mendukung kegiatan industri yang ada, baik dalam aspek pasokan barang (*supply*) maupun dalam distribusi dan pemasaran.

c. Kegiatan perdagangan eceran dengan skala pelayanan lokal dikembangkan dengan pola struktural secara hirarkis sesuai dengan struktur pusat – sub pusat

kawasan yang direncanakan karena kegiatan ini cenderung mendekati konsumen dan memiliki tata jenjang tertentu sesuai dengan skala pelayanan. Dengan pola ini diharapkan kegiatan perdagangan eceran ini dapat mengurangi beban pusat kawasan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan bagi penduduk .

4. Strategi Pengembangan Sektor Transportasi

Pengembangan sektor transportasi Kawasan Aruk dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut ini :

a. Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk mendukung arus perhubungan regional yang semakin berkembang pada masa mendatang. Dalam jangka pendek yang dilakukan adalah pemantapan prasarana yang ada untuk transportasi darat. Pembangunan terminal antar kota yang permanen dan memenuhi standar segera dilakukan.
b. Penetapan jalur regional dan jalur lokal dengan lebih integratif lagi. Hal ini penting untuk menghindari konflik antara arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal.
c. Memisahkan arus transportasi penumpang dan barang di dalam kawasan, terutama untuk arus transportasi internal kawasan perdagangan dan industri dengan arus transportasi regional.
d. Pengembangan sarana transportasi pada tingkat lokal adalah untuk meningkatkan akses kepada seluruh penduduk kawasan secara merata. Sedangkan pengembangan sarana angkutan antar wilayah adalah untuk memperlancar arus barang dan penumpang, serta untuk mendukung kegiatan industri yang dikembangkan.

5. Strategi Pengembangan Sektor Perumahan dan Permukiman

Pengembangan sektor perumahan secara umum harus mengacu kepada kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, yaitu proporsi keseimbangan antara rumah sederhana, menengah, dan mewah sebesar 6 : 3 : 1. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan pada kaidah pola pemanfaatan ruang kawasan.
b. Pengembangan perumahan harus berprinsip pada kaidah *site and services*, yang berarti para pengembang tidak saja membangun rumah, melainkan juga fasilitas pendukung kegiatan perumahan.

c. Pembangunan perumahan baru untuk para tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia (sektor perkebunan dan industri).
d. Pembangunan perumahan baru tidak saja bagi penduduk lokal yang belum mempunyai rumah yang permanen dan dimilki sendiri, tetapi juga disiapkan perumahan bagi para tenaga kerja pendatang untuk mendukung sektor industri dan perdagangan, serta Tenaga Kerja Indonesia di kawasan perbatasan (wilayah Sarawak).

C. Strategi Dasar Pengembangan Tata Ruang Kawasan

Strategi pengembangan tata ruang kawasan beberapa mencakup hal sebagai berikut:

1. Strategi Pengaturan Pintu Gerbang

Strategi yang dilakukan untuk dapat menjaga ketertiban dan kelancaran masuk dan keluar wilayah adalah :

a. Peningkatan fungsi fasilitas CIQ (*Custom, Imigration, and Quarantine*)
b. Pengembangan fasilitas pintu gerbang dikaitkan dengan pengembangan zone perdagangan bebas dengan memisahkan arus keluar masuk barang dan penumpang.
c. Pengaturan rute pergerakan pelintas batas di pintu gerbang

2. Strategi Pemantapan Kawasan Lindung

Strategi pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan batas sempadan sungai beserta anak sungainya
b. Mempertahankan wilayah-wilayah yang mempunyai kemiringan 40% atau lebih besar,
c. Menjaga kelestarian mata air dengan mempertahankan fungsinya,
d. Bila pembangunan kawasan terbangun tidak dapat lagi menghindari kawasan lindung, maka dibutuhkan pengaturan intensitasnya agar tidak merusak fungsi lindungnya.

3. Strategi Pengembangan Kawasan Fungsional

Strategi pengembangan kawasan fungsional ialah mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan pembedaan fungsional kawasan serta intensitas keterkaitan antar fungsi. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembebanan kegiatan pada satu kawasan saja dan mencegah terjadinya percampuran berbagai macam kegiatan yang sebenarnya tidak saling berhubungan. Kedua permasalahan tadi perlu dicegah sedini mungkin untuk

menghindari munculnya berbagai permasalahan ikutan seperti menurunnya kualitas lingkungan, pemusatan beban lalu lintas dan lain-lain.

4. **Strategi Pengembangan Sistem Pusat-pusat Pelayanan**

   Selain secara fungsional, penataan ruang Kawasan Pusat Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Aruk juga perlu mempertimbangkan prinsip struktural. Beberapa fungsi, terutama yang sifat pelayanannya lokal, lebih efisien bila ditata secara tersebar mengikuti pola penyebaran konsumennya. Untuk itu, strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan Kawasan Aruk adalah mengarahkan penataan ruang dengan menciptakan sub pusat baru untuk menyebarkan perkembangan fisik kawasan.

D. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana

Strategi pengembangan sistem prasarana lebih ditekankan pada usaha untuk merangsang pengembangan Kawasan Aruk kearah yang dikehendaki sesuai dengan strategi pengembangan kawasan fungsional dan strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan. Prasarana pada hakekatnya memiliki fungsi ganda selain untuk melayani penduduk dengan berbagai kegiatannya yang terjadi saat ini juga sangat efektif untuk merangsang pengembangan kawasan baru.

1. **Prasarana Transportasi**

   Pengembangan sistem transportasi darat diarahkan untuk membentuk kawasan yang lebih cenderung konsentris daripada linier dan mendukung penciptaan subpusat – subpusat baru (desentralisasi). Pengembangan sistem transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara jalur pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal dan sebaliknya.Pembangunan terminal antarkota ini perlu didukung dengan pembangunan terminal dalam kota, yang seyogyanya dilakukan secara pararel (bersama-sama) dengan pengembangan sarana angkutan umum dalam kota/kawasan.

2. **Prasarana Sanitasi Lingkungan**

   Prasarana sanitasi lingkungan dalam hal ini meliputi: air bersih, persampahan, limbah manusia, dan drainase. Strategi umum pengembangan prasarana sanitasi lingkungan ini adalah meminimalkan penggunaan yang bersifat nor-urban, dan menuju sistem prasarana yang bersifat urban dan dalam bentuk jaringan kolektif. Disamping itu, pada lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan industri dibutuhkan sebuah instalasi pengolah limbah yang dapat menetralkan lagi air

buangan, sehingga tidak merusak lingkungan. Strategi khususnya adalah pembangunan prasarana dilakukan secara terpadu baik dalam perencanaan, pemograman, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Target-target tertentu pembangunan prasarana yang secara nasional telah digariskan dijadikan acuan dalam pembangunan prasarana sanitasi lingkungan ini.

3. **Prasarana Lain**

   Prasarana lain adalah kelistrikan dan telekomunikasi. Sesuai dengan fungsi dari Aruk, maka pembangunan prasarana ini sangat penting, tidak saja bagi kebutuhan permukiman, tetapi juga untuk komersial, dan industri yang akan dikembangkan. Pembangunannya harus mempunyai cakupan pelayanan yang seoptimal mungkin, dengan tanpa mengabaikan aspek ekonomis dari investasi pembangunan prasarana tersebut.

4. **Fasilitas Sosial**

   Pengembangan fasilitas sosial diarahkan untuk membentuk struktur tata ruang yang tidak terpusat pada satu pusat tunggal, melainkan menyebar ke semua pusat pelayanan (pusat sekunder). Fasilitas sosial dalam skala lingkungan dikembangkan menjadi titik pengikat kegiatan masyarakat, sehingga pelayanan terhadap penduduk relatif sama. Penyebaran fasilitas sosial ini juga menjadi titik tolak bagi pemerataan pembangunan.

2.7.2 Kawasan Pengembangan Ekonomi Temajuk-Aruk Kabupaten Sambas

Dalam pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Temajuk-Aruk terdapat kebijakan spasial dan strategi pengembangan antara lain:

a. Adanya keterpaduan pengembangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan KASABA sebagai beranda negara depan
b. Mempercepat pengembangan wilayah melalui Pusat Pengembangan Ekonomi
c. Mewujudkan kerjasama ekonomi sub regional dengan menjaga keseimbangan dan keselarasan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan KPE Temajuk-Aruk

Untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pengembangan KPE Temajuk-Aruk diperlukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Pembangunan harus mempertimbangkan kondisi KPE Temajuk Aruk : bentuk kota yang lebih bernilai maupun kondisi budaya masyarakat

2. Mendorong ekspansi kota dengan pembangunan perumahan baru pada empat pusat permukiman berpola *node* atau tiga pusat permukiman berpola koridor dengan tetap memperhatikan kawasan lindung dan permukiman transmigrasi.
3. Lokasi untuk pembangunan baru: permukiman harus didukung oleh pembangunan infrastruktur baik pelayanan masyarakat, transportasi, air, listrik, dan komunikasi.
4. Mengembangkan ekonomi inovatif berbasis pada sektor potensial (kelapa sawit) dan industri sebagai dasar pembangunan ekonomi KPE Temajuk-Aruk.
5. Kawasan di sekitarnya dikembangkan sebagai zona/wilayah penyangga sebagai daerah penghasil bahan untuk produksi (sumber bahan baku) maupun area yang bernilai lingkungan (kawasan lindung).
6. Kota di sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi agar pelayanan maupun penyediaan infrastruktur lebih efisien dan efektif khususnya sarana transportasi dan utilitas untuk pelayanan masyarakat.
7. Perencanaan Tata Ruang KPE Temajuk-Aruk lebih menekankan pada kebijakan yang menfokuskan pada pertumbuhan kota-kota utama dengan dukungan transportasi regional.
8. Pertumbuhan kawasan pertumbuhan dirancang menjadi kota berfungsi PKN yang akan merubah fungsi perdesaan menjadi perkotaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat pendatang (baru) di masa mendatang serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kawasan pusat pertumbuhan harus dirancang sedemikian rupa agar perkembangan kota tidak memanfaatkan kawasan lindung.
9. Pertumbuhan harus dikelola untuk menghasilkan bentuk kota yang memberikan pelayanan yang efisien sehingga penyediaan infrastruktur terutama transportasi menjadi kunci utama dalam mendukung proses pembangunan.
10. Langkah penting untuk jangka panjang, pertumbuhan KPE Temajuk Aruk harus ditunjang dengan langkah menjaga meminimalisasi tekanan lingkungan terutama area disekitar pusat kota maupun membantu produktivitas wilayah penyangga (kawasan-kawasan perdesaan).
11. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan harus tetap dalam kerangka NKRI. Pengelolaan perbatasan dan keamanan yang lebih baik menjadi faktor utama dalam mengembangkan KPE Temajuk Aruk.

B. Rencana Penyediaan Sarana Dan Prasarana (Sarpras) KPE Temajuk Aruk

1. Rencana Penyediaan Sarana KPE

Rencana pengembangan sarana KPE akan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan. Berikut ini adalah rekapitulasi kebutuhan sarana berdasarkan kondisi eksisting (tahun 2002) dengan tahun proyeksi selama 10 tahun, mulai dari tahun 2005-2015.

Tabel 2.2 Data Perkiraan Kebutuhan Sarana Pendidikan di KPE Temajuk Aruk

Jenis sarana	Standar	Standar kebutuhan lahan	Fakta (2002)	Perkiraan Kebutuhan Sarana (unit)			Tingkat pelayanan
				2005	2010	2015	
Pendidikan							
TK	1.000 jiwa dan 1.600 jiwa	1200 m^2/unit	1	77	91	108	Kurang
SD	1.000 jiwa dan 1.600 jiwa	1200 m^2/unit	73	48	57	67	Memenuhi
SMP	4.800 jiwa	6.000 m^2/unit	12	16	19	22	Cukup
SMA	4.800 jiwa	6.000 m^2/unit	1	16	19	22	Kurang
Jumlah				157	186	219	
Kesehatan							
Puskesmas	30.000 jiwa	2.400 m^2	4	3	3	4	Memenuhi
Puskesmas Pembantu	10.000 jiwa	1.600 m^2	16	8	9	11	Memenuhi
Posyandu	3.000 jiwa	300 m^2	60	23	30	90	Cukup
Jumlah				34	42	105	
Peribadatan							
Langgar / musholla	2.500 jiwa	300 m^2	57	31	36	43	Memenuhi
Mesjid lingkungan	30.000 jiwa	1.750 m^2	94	3	3	4	Memenuhi
Jumlah				34	39	47	

Hasil analisis kebutuhan sarana pendidikan di KPE Temajuk Aruk berdasarkan tahun proyeksi 2005, 2010, dan 2015 untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih kurang, sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) kebutuhannya telah terpenuhi dan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercukupi.

Kebutuhan sarana kesehatan yaitu puskesmas, pukesmas pembantu dan posyandu telah terpenuhi dan untuk kebutuhan sarana peribadatan yaitu Mesjid dan musholla dinilai sangat mencukupi bagi masyarakat KPE. Walaupun berdasarkan analisis tersebut mengindikasikan belum dibutuhkannya sarana kesehatan setingkat rumah sakit di KPE Temajuk Aruk, namun status kawasan yang menjadi PKN ini mensyaratkan dibutuhkannya rencana pembangunan rumah sakit untuk melayani masyarakat di sekitar kawasan perbatasan.

2. Rencana Sistem Prasarana

Sistem prasarana wilayah dapat dibentuk oleh beberapa komponen yang umumnya merupakan sebuah sistem jaringan baik itu jalan sebagai pembentuk sistem jaringan transportasi, maupun utilitas listrik atau telekomunikasi sebagai pembentuk sistem jaringan utilitas atau prasarana kawasan. Rencana struktur tata ruang KPE Temajuk Aruk terdiri dari rencana sistem transportasi (mencakup darat, laut, dan udara), rencana jaringan listrik, dan rencana jaringan telekomunikasi

a. Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Sistem transportasi KPE Temajuk Aruk akan meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara.

a) Transportasi Darat

Pengembangan transportasi darat ini terutama diarahkan untuk memperlancar hubungan eksternal dan internal hubungan daerah pedalaman dengan daerah pesisir pantai untuk memacu pertumbuhan daerah pedalaman agar dapat mengimbangi perkembangan wilayah pantai. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri dari:

b) Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut dititikberatkan pada upaya optimalisasi pengembangan Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Merbau, Tanjung Api di Kecamatan Paloh dengan fungsi sebagai pelabuhan samudra. Untuk mengimbangi pusat pelabuhan samudera tersebut, maka diusulkan untuk dilakukan studi kelayakan pembangunan pangkalan TNI AL di Tanjung Api yang bersebelahan dengan Pelabuhan Merbau dijadikan Pangkalan Angkatan Laut

c) Transportasi Udara

Prasarana transportasi udara yang ada di Kabupaten Sambas saat ini dan perlu dikembangkan adalah lapangan udara transportasi udara perintis yang berada di Kecamatan Paloh. Secara bertahap, status lapangan udara ini dapat ditingkatkan menjadi lapangan udara bertaraf internasional. Pada saat ini lapangan udara sudah tidak dipergunakan lagi, akan tetapi untuk masa yang akan datang keberadaan prasarana lapangan udara ini menjadi modal dasar bagi pengembangan transportasi udara di Kabupaten Sambas, apalagi bila pintu perbatasan negara di Temajuk telah resmi dibuka.

b. Rencana Sistem Prasarana Listrik

Pelayanan kebutuhan listrik di wilayah Kecamatan Sajingan Besar, *supply* listrik disediakan oleh PLN Ranting yang saat ini masih dirasakan belum optimal dalam memberikan pelayanan untuk semua desa di kecamatan tersebut. PLN tersebut hanya dapat beroperasi selama 12 jam setiap hari untuk melayani 240 buah rumah dan 7 buah kantor pemerintah. Selain itu air terjun Riam Merasap pada saat ini telah dijadikan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kekuatan 60 KW, namun masih mengalami kerusakan di mana bak penampung dan bendungan jebol sehingga belum dapat dioperasikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pola pengembangan sistem pelayanan listrik untuk KPE Temajuk Aruk diarahkan sebagai berikut:

a) Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau menambah kapasitas terutama pusat permukiman seperti di Temajuk,Liku, Kaliau, Galing, dan Sejangkung
b) Peningkatan dan pencarian alternatif sumber tenaga baru, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang menggunakan sumber tenaga dari riam air terjun di beberapa daerah, seperti air terjun Riam Merasap di Sajingan Besar, Riam Pencarek di Tanjung Senatap, dan Riam Batang Air di Kampung Batang Air
c) Perbaikan disertai pemeliharaan prasarana listrik, mulai dari pemeliharaan unit generator diesel sampai ke penyediaan genset.
d) Penyusunan studi kelayakan bagi pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA)
e) Peningkatan pelayanan listrik sampai ke daerah pedalaman, di mana terdapat akumulasi penduduk lebih dari 500 jiwa.

c. Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi untuk Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar masih belum terjangkau oleh Kantor Cabang PT Telkom Sambas. Di Kecamatan Paloh pada tahun 1997, sudah dilakukan pembangunan jaringan telepon bawah tanah sepanjang 20 km, namun sampai saat ini belum ada realisasi lebih lanjut. Sedangkan untuk Kecamatan Sajingan Besar, rencana pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi diupayakan berupa pengadaan

Fasilitas Telekomunikasi Perintis yang paling tidak berada pada pusat pemerintahan kecamatan yaitu Kota Kaliu.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rencana pengembangan sistem telekomunikasi di KPE Temajuk Aruk diarahkan sebagai berikut:

a) Pengadaan fasilitas telekomunikasi perintis yang menjangkau seluruh kecamatan yang ada di KPE Temajuk Aruk, paling tidak berada di koridor-koridor pengembangan seperti Temajuk-Liku, Galing-Sejangkung, dan Galing-Aruk
b) Penambahan jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) kepada masyarakat di KPE. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2012, maka jumlah SST yang minimal harus disediakan untuk Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar berturut-turut 1083 SST dan 445 SST. (dengan asumsi menggunakan standar PU, bahwa satu SST melayani 20 jiwa penduduk)
c) Namun dalam implementasinya, peningkatan jumlah SST ini juga ditentukan oleh ketersediaan catu daya serta yang paling penting adalah kemampuan ekonomi masyarakat.
d) Penambahan jumlah fasilitas Telepon Umum Kartu (TUK) dan Telepon Umum Coin (TUC) bagi seluruh lapisan masyarakat setempat.
e) Penggantian dan peningkatan sistem telekomunikasi dari sentral telepon otomat menjadi digital, terutama pada jalur yang berada pada jaringan telekomunikasi Sambas-Singkawang.

2.8 Studi Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa masukan dari studi terdahulu yang sejenis.Persamaan penelitian ini dengan studi terdahulu yang digunakan adalah wilayah studi yang berada di kawasan perbatasan.

A. Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan Secara Terpadu (Kharina Silvianingrum)

Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Output yg digunakan
Konsep pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan secara terpadu	- Ekonomi - Infrastruktur	Analisis LQ dan Metode Delphi	Konsep kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang infrastruktur dan perekonomian	- Variabel karakteristik fisik dasar dan binaan - Metode analisis pergerakan

B. Arahan Pengembangan Kawasan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan (Siti Juhainah)

Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Output yg digunakan bagi penelitian
Arahan pengembangan kawasan perbatasan untuk mengurangi ketimpangan wilayah	- Sosial - Ekonomi - Infrastruktur	- Analisis deskriptif-evaluatif potensi dan masalah - Indeks Williamson	Arahan potensi unggulan per sektor tiap kecamatan yang berbatasan untuk mengurangi ketimpangan	- Metode analisis orientasi pergerakan kawasan perbatasan - Pemilihan variabel penelitian

2.9 Kerangka Teori

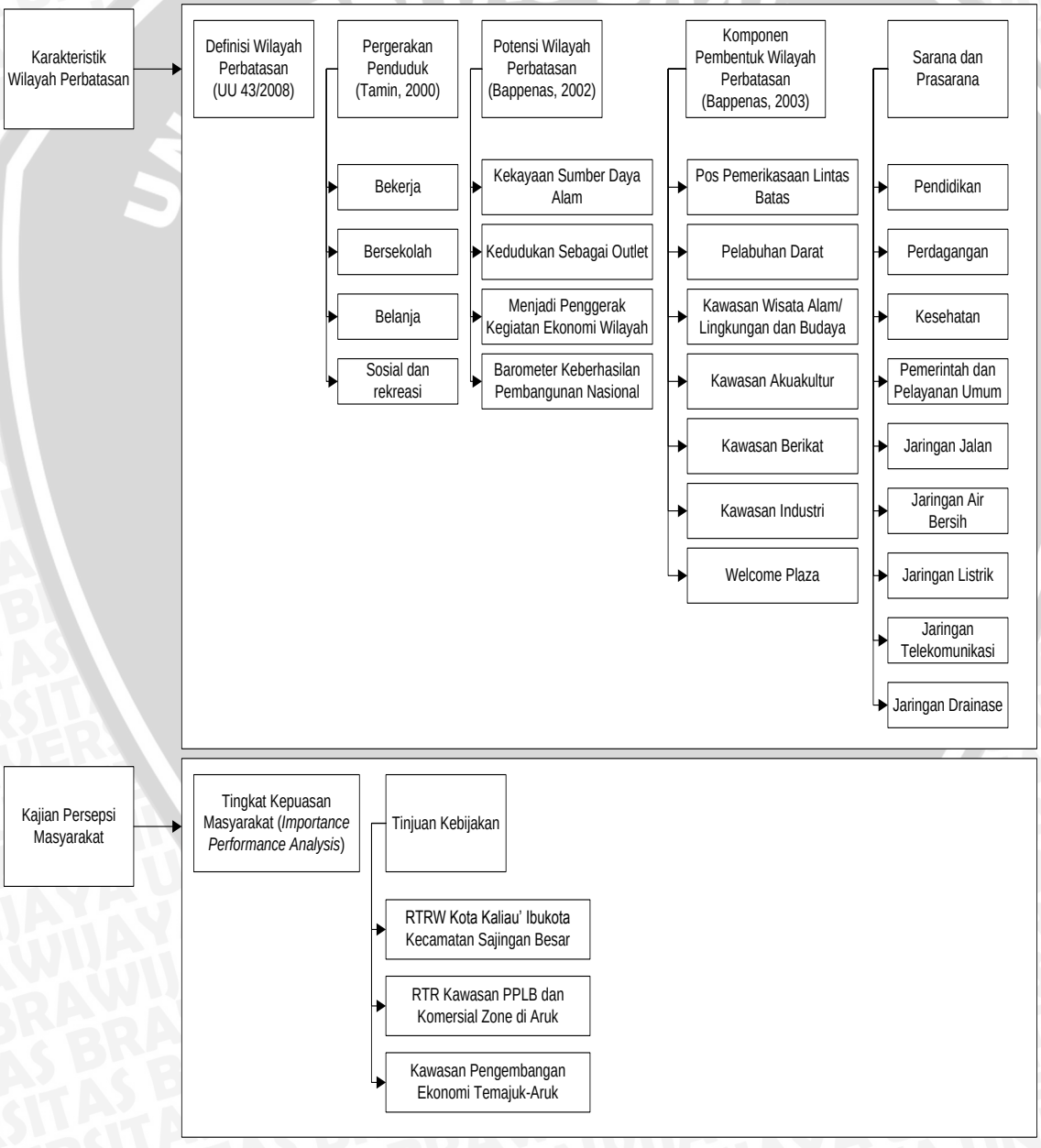

Gambar 2.2 Kerangka Teori